

Pengaruh Pengetahuan Peraturan, Komitmen Manajemen, Dan Lingkungan Birokrasi Terhadap Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Padang)

Muhammad Ikhsan¹, Vita Fitria Sari²

¹Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

²Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: mikhsan081298@gmail.com

Abstract: *This study aims to determine the effect of regulatory knowledge, management commitment, and the bureaucratic environment on budget absorption related to the procurement of goods / services in the government of Padang City. A sample of 82 respondents was determined by using a total sampling technique consisting of heads of fields or staff of the procurement department. Data were analyzed using multiple regression formulas with the help of the SPSS application. This study concludes that regulatory knowledge does not affect budget absorption related to goods / services procurement. Management commitment has a positive and significant effect on budget absorption related to the procurement of goods / services. Meanwhile, the bureaucratic environment has no effect on budget absorption related to the procurement of goods / services.*

Keywords: *Knowledge of Regulations; Management Commitment; Bureaucratic Environment; Absorption of Budget Related to Procurement of Goods / Services*

How to cite (APA 6th style):

Ikhsan, M & Sari, V, F. (2020). Pengaruh Pengetahuan Peraturan, Komitmen Manajemen dan Lingkungan Birokrasi terhadap Penyerapan Anggaran terkait Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Padang). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), Seri D. 3705-3719.

PENDAHULUAN

Anggaran digunakan sebagai alat untuk perencanaan dan sebagai alat untuk pengendalian. Dalam perencanaan, kegunaan anggaran adalah untuk melihat pencapaian suatu target yang diinginkan oleh pemerintah. Sedangkan dalam pengendalian, kegunaan anggaran adalah untuk memperlihatkan suatu pengalokasian sumber dana publik untuk dimanfaatkan (Putri, 2014) . Pemerintah dalam menjalankan kegiatannya tentu menggunakan sumber dana yang tersedia pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sejauhmana anggaran telah digunakan pemerintah untuk pengendalian dalam menjalankan roda pemerintahannya dapat dilihat pada anggaran belanja perangkat pemerintah itu sendiri (Elim, 2018).

Pada suatu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terdapat akun belanja modal yang memberikan informasi terkait seberapa besar pemerintah mewujudkan kesejahteraan publik dengan pengeluaran yang dilakukannya. Pengeluaran disini merupakan bentuk usaha pemerintah guna memberikan pelayanan terbaik kepada publik, seperti memberikan fasilitas yang memadai, pembangunan infrastruktur, membuka lapangan kerja, serta program-program lainnya. Pemerintah berperan dalam perkembangan Negara dengan demikian pemerintah seharusnya dapat menunjang kemajuan roda perekonomian Negara. Hilangnya suatu manfaat belanja merupakan dampak yang dihasilkan atas kegagalan pemerintah dalam melakukan penyerapan anggaran yang tersedia. Dalam arti kata masih terdapat dana pada akhir periode (sumber:www.bpkp.go.id, 2011). Sumber dana yang terbatas akan optimal penggunaannya jika tingkat serapan terhadap anggaran tinggi. Keterbatasan sumber dana seharusnya lebih mendorong pemerintah dalam melakukan perencanaan program serta pengalokasian anggaran yang tepat (Negara, Handajani, & Effendy, 2018).

Salah satu upaya dalam mewujudkan hal tersebut maka pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur ataupun berupa bentuk barang serta jasa yang dibutuhkan dan dapat digunakan masyarakat. Pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak terlepas dari upaya pencapaian visi dan misi organisasi pemerintah. Visi dan misi organisasi pemerintah tersebut dicapai melalui pengadaan barang/jasa telah ditetapkan lebih awal pada saat penyusunan rencana anggaran, supaya cepat dilakukannya penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran terkait dengan pengadaan barang/jasa yang terjadi di Indonesia menjadi persoalan yang telah terjadi di setiap tahunnya. Berbagai macam upaya yang dilakukan pemerintah guna mempercepat penyerapan anggaran terkait dengan pengadaan barang/jasa pun telah dilakukan.

Ringkasan laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Padang tercatat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 penyerapan anggaran terkait pengadaan barang dan jasa belum terealisasi secara maksimal. Dalam arti kata serapan anggaran masih dibawah 90%. Persentasi mengenai serapan anggaran ini tidak diatur dalam undang-undang, namun pada saat akhir tahun anggaran instansi pemerintah berusaha menyerap anggaran mendekati 100%, agar tidak ditetapkan penyerapan anggarannya rendah. Jika penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa tidak terealisasi secara sempurna, akan menciptakan suatu tempat untuk melakukan kecurangan dalam memanfaatkan anggaran yang tidak terealisasi itu. Sebagaimana pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sekitar 70% kecurangan dalam bentuk korupsi terjadi pada pengadaan barang/jasa (Budi, 2012).

Penyerapan anggaran terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah kurang maksimal karena banyaknya permasalahan dalam tahap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Lambat nya proses tender, penerbitan dokumen yang tidak efisien, kurangnya dukungan dari atasan serta pegawai yang memiliki keahlian, dan minimnya keikutsertaan pegawai dalam pelaksanaan kegiatan (sumber:www.bpkp.go.id, 2011). Permasalahan seperti ini juga terjadi pada Pemerintah Kota Padang. Penyerapan anggaran setiap tahunnya dinilai sering terlambat, persoalan krusial yang terjadi yakni terlambatnya penyampaian dokumen pengadaan kepada unit layanan pengadaan, tidak maksimalnya proses kontrak pengadaan barang/jasa karena lemahnya pemahaman dan pengetahuan beberapa lembaga/organisasi dan SKPD Kota Padang (sumber:sumbar.antaraneews.com, 2018). Akibatnya penyusunan anggaran pengadaan barang/jasa juga tidak maksimal dan terlambat pada rencana umum pengadaan (RUP). Hal ini berarti, masih dibutuhkan penelitian yang mendalam dan lebih lanjut terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang dan jasa.

Pengetahuan peraturan adalah seluruh hal yang diketahui seseorang tentang aturan atau standar yang berisikan ketentuan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman. Pengetahuan peraturan

diperlukan untuk efektivitas dalam implementasi dan pelaksanaan penyerapan anggaran. Pengetahuan peraturan dapat dijadikan untuk mengatur kegiatan penyerapan anggaran dengan menggunakan sistem pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum. Penyerapan Anggaran dapat dengan baik terlaksana apabila para aparat SKPD memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyerapan anggaran akan optimal apabila pelaksanaannya memiliki pengetahuan yang luas akan peraturan (Aprlliani, Herawati, & Wahyuni, 2017) . Pengetahuan Peraturan memiliki korelasi yang kuat sebagai faktor yang mempengaruhi Penyerapan Anggaran (Juliani, 2014). Hal ini berarti, suatu perangkat pemerintah atau organisasi yang pelaksanaan penyerapan anggarannya maksimal dikarenakan pegawainya memiliki pengetahuan akan peraturan yang berlaku.

Komitmen manajemen adalah suatu sikap manajemen dimana manajemen memiliki keinginan untuk mengikat diri dengan organisasinya atau perusahaannya dan manajemen yakin dan nyaman akan organisasi tempat ia bekerja. Dalam mewujudkan kesejahteraan organisasi manajemen ikut serta memberikan komitmennya berupa kreatifitas dan waktu seutuhnya. Pencapaian target anggaran pada sektor pemerintah didukung oleh manajemen yang memiliki kemampuan serta berkomitmen (Halim dan Kusufi, 2012). Komitmen manajemen menggambarkan suatu hubungan antara atasan dengan bawahan dalam mencapai tujuan yang sama (Cooper, 2006). Hal ini berarti, komitmen manajemen dapat memengaruhi penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa.

lingkungan birokrasi merupakan wewenang yang dimiliki pihak internal dalam lingkungan pemerintahan. Birokrasi merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan (Sedarmayanti, 2009). Keberhasilan sesuatu kegiatan dapat dinilai dari baik atau tidaknya keadaan lingkungan birokrasi. Dalam menjalankan struktur organisasi dengan sistem kerja yang stabil, dibutuhkan kejelasan dalam lingkungan birokrasi pada umumnya, seperti suasana lingkungan kerja internal maupun lingkungan kerja eksternal. Pada hakikatnya lingkungan birokrasi merupakan struktur organisasi di ruang lingkup pemerintahan yang memiliki ruang lingkup tugas yang sangat luas serta memerlukan organisasi besar dengan sumber daya manusia yang besar pula jumlahnya (Bramastyasa, 2019). Kesuksesan suatu organisasi tidak akan terjadi jika kurangnya dorongan lingkungan birokrasi dalam kegiatan organisasi. Hal ini berarti, lingkungan birokrasi dapat memengaruhi penyerapan anggaran terkait pengadaan barang dan jasa.

Beberapa penelitian sebelumnya seperti penelitian Purtanto (2015) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja pemerintah daerah: proses pengadaan barang/jasa (studi atas persepsi pada pegawai bersertifikat pengadaan barang/jasa di Pemerintahan Kota Tegal) menghasilkan 2 faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu komitmen manajemen dan perencanaan anggaran. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Ledy (2016) mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud menghasilkan 5 faktor utama yang menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran belanja yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang/jasa, komitmen manajemen dan lingkungan birokrasi. Dan juga pada penelitian Bramastyasa (2019) mengenai pengaruh perencanaan anggaran, sumber daya manusia, lingkungan birokrasi dan pengetahuan peraturan terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Hasil penelitiannya menunjukkan semua variabel independen yang digunakan memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Juliani (2014) mengenai pengaruh faktor-faktor kontekstual terhadap persepsian penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa.

Hasil penelitiannya mendapatkan 3 faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa diantaranya adalah pengetahuan peraturan, komitmen manajemen, dan lingkungan birokrasi. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana penelitian ini diteliti di tempat dan waktu yang berbeda, yaitu di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kota Padang dengan periode waktu 2020. Serta penelitian ini menggunakan responden yaitu kepala bagian pengadaan atau pegawai di bidang pengadaan sesuai dengan saran yang diberikan oleh penelitian sebelumnya dikarenakan penelitian ini berhubungan dengan kebijakan penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa.

Alasan peneliti menggunakan faktor pengetahuan peraturan, komitmen manajemen, dan lingkungan birokrasi dalam penelitian ini dikarenakan ketiga faktor ini dapat menjadi faktor penting dalam peningkatan penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Peneliti ingin memberikan kontribusi dengan melakukan pengujian kembali apakah pada variabel dan teori yang sama, tetapi pada waktu dan tempat yang berbeda akan memberikan hasil yang sama atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa, peneliti berharap nantinya dengan penelitian ini dapat menyelesaikan permasalahan penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa khususnya dimana peneliti meneliti yaitu di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Institusional (*Institusional Theory*)

Teori Institusional (*Institusional Theory*) atau teori kelembagaan yaitu terbentuknya organisasi oleh tekanan lingkungan institutional yang mengakibatkan terjadinya institutionalisasi. Teori ini berlandaskan pemikiran bahwa untuk bertahan hidup, suatu organisasi dapat meyakinkan kepada publik atau masyarakat luas bahwa organisasi adalah suatu entitas yang sah (*legitimate*) serta layak mendapatkan dukungan (Ridha dan Basuki, 2012). Scott (2008) menjelaskan bahwa teori institusional ini digunakan untuk menjelaskan tindakan dan pengambilan keputusan dalam organisasi publik.

Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa

Menurut Halim (2014), penyerapan anggaran adalah sebuah kesuksesan dari sebuah estimasi yang akan diperoleh selama satu dekade tertentu dan dipandang pada suatu waktu tertentu (realisasi dari anggaran). Penyerapan anggaran bisa didefinisikan sebagai pencairan atau realisasi anggaran sehubungan yang tercantum dalam laporan realisasi anggaran (LRA) pada saat tertentu, dapat dilihat disini adalah organisasi sektor publik atau entitas pemerintahan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 1 ayat (1), pengertian pengadaan barang/jasa adalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya dikatakan Pengadaan Barang/Jasa merupakan sebuah proses dalam menghasilkan Barang/Jasa oleh Kementrian/Badan yang terarah sehingga barang dan jasa tersebut bisa dimanfaatkan.

Pengetahuan Peraturan

Pengetahuan adalah hasil pengetahuan seseorang terhadap suatu objek lewat panca indra yang dimilikinya. Panca indra manusia terhadap objek yakni pendengaran, penciuman, penglihatan, rasa dan perabaan. Pada waktu penginderaan untuk mendapatkan pengetahuan tersebut dipedomani oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indra penglihatan dan indra pendengaran (Notoatmodjo, 2014). Peraturan adalah perangkat yang berisikan ketentuan untuk dijadikan pedoman yang merupakan hasil dari keputusan bersama yang telah disepakati dalam suatu organisasi yang

bersifat mengikat, pembatasan dan pengaturan harus ditaati serta dilaksanakan agar terhindar dari sanksi untuk terciptanya keadaan yang teratur (Bayuarsadinata, 2015). pengetahuan peraturan adalah seluruh hal yang diketahui seseorang tentang aturan atau standar yang berisikan ketentuan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman. Pengetahuan akan peraturan dapat diperoleh melalui seminar tentang peraturan, penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan oleh lembaga hukum.

Komitmen Manajemen

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia No.25/KEP/M.PAN/2002 menyatakan pengertian komitmen manajemen adalah keteguhan hati, tekad yang mantap, dan janji untuk melakukan atau mewujudkan sesuatu yang diyakini. Komitmen manajemen mencerminkan sejauh mana seseorang individu mengidentifikasi tujuannya terhadap organisasi (Kreitner, 2008). Komitmen manajemen dapat diartikan perilaku yang penting dan dapat digunakan organisasi dalam penilaian kecenderungan manajemen untuk tetap bertahan sebagai anggota organisasi (Sopiah, 2008).

Lingkungan Birokrasi

Birokrasi adalah alat atau teknik yang dibuat demi keberhasilan dan kemampuan suatu pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan atau sasaran tertentu (Eisenstadt 1959). Lingkungan disini adalah lingkungan internal maupun lingkungan eksternal organisasi. Pada lingkungan internal organisasi memberikan dampak yang terjadi didalam organisasi tersebut seperti hubungan antar karyawan, sosialisasi, pengendalian internal organisasi, dan lain-lain. Kondisi internal pegawai ini senantiasa berganti dan berkembang, sehingga mewujudkan sebuah pemahaman yang sesuai, agar permasalahan-permasalahan yang timbul dapat dipecahkan. Berbeda dengan lingkungan internal, lingkungan eksternal organisasi lebih fokus terhadap kondisi yang terjadi diluar organisasi seperti pihak luar yang bekerjasama, kebijakan Negara, pembaruan teknologi, serta masyarakat umum (Matheus dan Sulistiyani, 2011).

Pengaruh Pengetahuan Peraturan Terhadap Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa

Pengetahuan Peraturan harus dimiliki oleh Pegawai yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa. Jika para pegawai mengetahui berbagai macam informasi dari peraturan yang ada terkait pengadaan barang/jasa, maka akan menghasilkan perubahan atau peningkatan peraturan. Dalam perspektif teori institusional, segala perilaku dan tindakan yang diambil oleh pegawai publik terkait pengadaan barang/jasa selalu dibatasi oleh institusional (Juliani, 2014). Para pegawai yang dibatasi oleh keterbatasan dalam memperoleh suatu informasi mengenai peraturan, akan berdampak pada proses bagaimana cara mengetahui pengetahuan-pengetahuan yang baru dalam menyerap anggaran secara sempurna.

Hasil penelitian Bramastyasa (2019) menunjukkan pengetahuan peraturan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Selanjutnya, Juliani (2014) menemukan hasil bahwa pengetahuan peraturan berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Serta, Dewa (2017) menunjukkan pengetahuan peraturan mempengaruhi penyerapan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar tingkat pengetahuan peraturan SKPD maka semakin baik penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Berdasarkan landasan teori dan temuan empiris di atas, maka peneliti dapat merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1: Pengetahuan peraturan berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa

Pengaruh Komitmen Manajemen Terhadap Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa

Dalam perspektif teori institusional, Komitmen manajemen terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa sangat dibutuhkan karena akan sangat memengaruhi maksimal atau tidaknya serapan anggaran. Hal ini dapat dilihat bagaimana Kepala SKPD memberikan dukungan secara nyata terhadap kinerja bawahannya untuk mencapai penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Komitmen yang tinggi menjadikan individu lebih mementingkan organisasi dari pada kepentingan pribadi dan berusaha menjadikan organisasi menjadi lebih baik. Evaluasi target serapan anggaran, mendukung pelatihan terkait pengadaan, menerapkan sistem honor sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi merupakan bukti adanya komitmen manajemen yang baik dari kepala SKPD terkait penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Dukungan manajemen puncak dapat digunakan untuk mencapai kesuksesan implementasi karena para manajer dapat memfokuskan pada waktu, sumber daya, tujuan, pendekatan positif, dan strategi yang diperlukan sehingga perannya dalam memengaruhi keberhasilan organisasi terpenuhi.

Hasil penelitian Purtanto (2015), dan Meyulinda (2018) menunjukkan bahwa komitmen manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Lemahnya komitmen manajemen merupakan salah satu faktor penyebab minimnya penyerapan anggaran (Arif, 2013). Sementara itu, Juliani (2014) menemukan dalam penelitiannya bahwa komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Berarti semakin tinggi komitmen manajemen maka penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa akan maksimal. Berdasarkan landasan teori dan temuan empiris di atas, maka peneliti dapat merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H2: Komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa

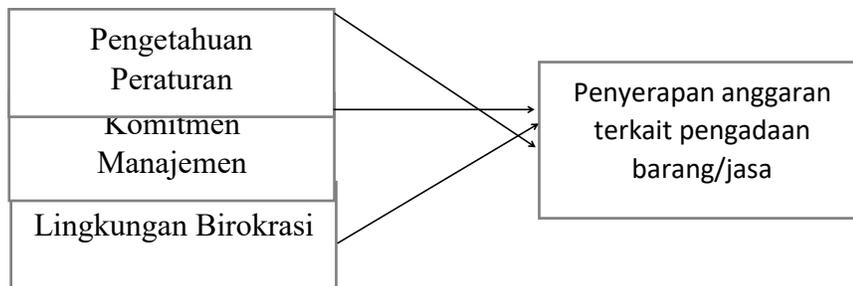
Pengaruh Lingkungan Birokrasi Terhadap Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa

Dalam perspektif teori institusional, organisasi sektor publik dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya seharusnya berperan sebagai unit analisis yang meyakinkan publik atas segala tindakan yang dilakukan oleh pegawai publik dalam memaksimalkan penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Dalam hal ini dijelaskan bahwa unit analisis dalam teori institusional adalah organization field yaitu sekelompok organisasi yang secara keseluruhan membentuk suatu kehidupan institusional seperti pemasok utama, pelanggan, regulator atau pesaing (Darono, 2013). Jika suatu kehidupan institusional dalam organisasi sektor publik, baik sebagai pemasok utama, pelanggan, regulator atau pesaing berjalan seirama dengan aspek-aspek sosial dan hukum, tekanan maupun kepentingan konstituen tidak akan mempengaruhi pegawai publik dalam memaksimalkan penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Lingkungan birokrasi yang baik akan membuat pelaksanaan kegiatan operasional menjadi lancar. Namun jika lingkungan birokrasi tidak mendukung kegiatan organisasi maka akan menghambat kinerja organisasi.

Hasil penelitian Ledy (2016) mendukung penelitian Juliani (2014) yang menunjukkan lingkungan birokrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Hasil penelitian Denita (2017), Meyulinda (2018), dan Bramastyasa (2019)

menunjukkan bahwa lingkungan birokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hal ini menunjukkan semakin baik lingkungan dalam birokrasi akan menghasilkan ketepatan dalam penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Berdasarkan landasan teori dan temuan empiris di atas, maka peneliti dapat merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :
H3: Lingkungan birokrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka konseptual

METODE PENELITIAN

Jenis, Populasi, dan Sampel Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif, yang merupakan penelitian hubungan yang bersifat sebab akibat dengan dua variabel atau lebih. Populasi pada penelitian ini yaitu 41 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu purposif Sampling. Dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek. Data subjek merupakan jenis data yang berisikan sebuah perilaku, bukti nyata dari masa lalu serta pendapat suatu individu atau kelompok yang merupakan responden dari penelitian. Data berupa tanggapan tertulis atas pertanyaan atau kuesioner dari subjek penelitian pada Satuan Kerja Perangkat daerah Kota Padang. Penelitian ini menggunakan sumber data primer. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber ahli (tidak melalui media perantara). Data primer diperoleh dengan menggunakan kuesioner yaitu daftar pertanyaan yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari para responden.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dengan cara membagi angket kuesioner yang berisi pernyataan yang sudah disiapkan alternatif jawabannya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2011). Kuesioner diantarkan langsung ke alamat responden. Dalam tahap pembagian kuesioner, peneliti membagikan dua buah kuesioner kepada 41 Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) Kota Padang. Untuk pengembaliannya akan dijemput sendiri oleh peneliti pada waktu yang telah ditentukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Tabel 1
Hasil statistik deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
x1	41	17	29	21.95	2.683
x2	41	20	30	25.88	2.909
x3	41	27	45	35.88	4.063
Y	41	27	45	40.46	4.336
Valid N (listwise)	41				

Sumber: Data Primer yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata (*mean*) penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa sebagai variabel dependen sebesar 40,46 dengan standar deviasi sebesar 4,33. Nilai maksimum dan minimum penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa adalah 45 dan 27. Variabel independen pertama dalam penelitian ini adalah pengetahuan peraturan memiliki nilai rata-rata sebesar 21,95 dengan standar deviasi sebesar 2,68. Nilai maksimum dan minimum pengetahuan peraturan adalah 29 dan 17. Variabel independen kedua dalam penelitian ini adalah komitmen manajemen memiliki nilai rata-rata 25,88 dengan standar deviasi sebesar 2,9. Nilai maksimum dan minimum komitmen manajemen adalah 30 dan 20. Variabel independen ketiga adalah lingkungan birokrasi memiliki nilai rata-rata 35,88 dengan standar deviasi sebesar 4,06. Nilai maksimum dan minimum lingkungan birokrasi adalah 45 dan 27. Hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini beragam dan bervariasi dikarenakan standar deviasi yang dimiliki oleh semua variabel besar dari 0.

UJI ASUMSI KLASIK

Uji Normalitas

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas (One-Sample Kolmogorof-Smirnof Test)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		41
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.84374044
Most Extreme Differences	Absolute	.086
	Positive	.076
	Negative	-.086
Test Statistic		.086
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi $0.2 > 0.05$. Maka, dapat dikatakan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

Uji Multikolonioritas

Tabel 3
Hasil Uji Multikolineoritas

Model	Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF	
	B	Std. Error	Beta					
1 (Constant)	19.579	7.138		2.743	.009			
pengetahuan peraturan	-.019	.272	-.012	-.071	.943	.752	1.330	
komitmen manajemen	.551	.251	.369	2.191	.035	.747	1.338	
lingkungan birokrasi	.197	.171	.184	1.148	.258	.823	1.215	

a. Dependent Variable: penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.11 diatas, dapat diketahui bahwa variabel pengetahuan peraturan dengan nilai (VIF) 1,33 dan *tolerance* 0,75, variabel komitmen manajemen dengan nilai (VIF) 1,33 dengan *tolerance* 0,74, serta variabel lingkungan birokrasi dengan nilai (VIF) 1,21 dengan *tolerance* 0,82. Dengan demikian dapat dikatakan tidak terdapat korelasi variabel-variabel bebas antara satu dengan yang lainnya, atau variabel independen pada penelitian ini bebas dari gejala multikolinearitas.

Uji Heterokodestisitas

Tabel 4
Hasil Uji Heteroskedestisitas

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.660	4.749		1.402	.169
pengetahuan peraturan	-.007	.181	-.007	-.037	.971
komitmen manajemen	-.052	.167	-.058	-.308	.760
lingkungan birokrasi	-.066	.114	-.104	-.579	.566

a. Dependent Variable: RES2

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel independen yaitu pengetahuan peraturan 0,97, komitmen manajemen 0,76, dan lingkungan birokrasi 0,56 memiliki nilai yang lebih besar dari pada nilai $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa untuk model regresi tidak terdapat gejala heteroskedastifitas.

UJI HIPOTESIS
Analisis Regresi Berganda

Tabel 5
Analisis Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	19.579	7.138		2.743	.009
pengetahuan peraturan	-.019	.272	-.012	-.071	.943
komitmen manajemen	.551	.251	.369	2.191	.035
lingkungan birokrasi	.197	.171	.184	1.148	.258

a. Dependent Variable: penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020

Secara sistematis hasil uji regresi berganda dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y = 19,579 + (-0,019) PP + 0,551 KM + 0,197 LB + e$$

Persamaan tersebut menunjukkan pengaruh pengetahuan peraturan, komitmen manajemen dan lingkungan birokrasi terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 6
Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R-Square)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.463 ^a	.214	.151	3.997

a. Predictors: (Constant), lingkungan birokrasi, pengetahuan peraturan, komitmen manajemen

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel 6 diatas besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,151. Hal ini mengidentifikasi bahwa kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 15,1 %, sedangkan 84,9% lainnya ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

Uji Statistik F

Tabel 7
Uji Statistik F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	161.221	3	53.740	3.365	.029 ^b
Residual	590.974	37	15.972		
Total	752.195	40			

a. Dependent Variable: penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa

b. Predictors: (Constant), lingkungan birokrasi, pengetahuan peraturan, komitmen manajemen

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 7 diatas, hasil analisis data yang diperoleh menguji hipotesis penelitian ini, maka dilakukan uji F dengan membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel. Pada level signifikansi 0,05, besar Ftabel yang didapatkan dengan rumus $F(k;n-k)$ adalah 2,85. Hasil pengolahan statistik analisis regresi menunjukkan nilai $F = 3,365$ dan signifikansi pada level 0,029. Jadi $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $3,365 > 2,85$ (sig. $0,029 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh pengetahuan peraturan, komitmen manajemen, lingkungan birokrasi secara bersama-sama terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa.

Uji Statistik T

Tabel 8
Uji Statistik t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	19.579	7.138		2.743	.009
pengetahuan peraturan	-.019	.272	-.012	-.071	.943
komitmen manajemen	.551	.251	.369	2.191	.035
lingkungan birokrasi	.197	.171	.184	1.148	.258

a. Dependent Variable: penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 8 maka dapat diketahui pengaruh variabel independen pertama yaitu pengetahuan peraturan nilai thitung adalah -0,071 dan nilai sig adalah $0,943 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini membuktikan variabel pengetahuan peraturan tidak memiliki pengaruh secara simultan terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Dengan demikian, hipotesis pertama ditolak.

Variabel independen kedua yaitu komitmen manajemen nilai thitung adalah 2,191 dan nilai sig adalah $0,035 < 0,05$. Nilai koefisien β 0,551. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini membuktikan variabel komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Dengan demikian, hipotesis kedua diterima.

Variabel independen ketiga yaitu lingkungan birokrasi nilai thitung adalah 1,148 dan nilai sig adalah $0,258 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini membuktikan variabel lingkungan birokrasi tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Dengan demikian, hipotesis ketiga ditolak.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengetahuan Peraturan Terhadap Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa

Hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini yaitu pengetahuan peraturan berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Hasil uji statistik t untuk variabel pengetahuan peraturan memiliki nilai t hitung 0,189 dengan nilai signifikansi 0,85 lebih besar dari 0,05. Nilai koefisien regresi menunjukan arah negatif dengan nilai -0,019. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan peraturan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) ditolak.

Menurut perspektif teori institusional, segala perilaku dan tindakan yang diambil oleh pegawai publik terkait pengadaan barang/jasa selalu dibatasi oleh organisasi. Organisasi pemerintahan memberlakukan aturan serta norma-norma dalam bentuk program untuk mencapai tujuan pengoperasiannya. Peraturan diciptakan agar dapat mendukung proses pengambilan keputusan di lingkungan organisasi. Berdasarkan hal tersebut tidak berpengaruhnya pengetahuan peraturan disebabkan karena para pegawai dibatasi oleh keterbatasan dalam memperoleh suatu informasi mengenai peraturan pengadaan barang/jasa, hal ini berdampak pada proses bagaimana cara mengetahui pengetahuan-pengetahuan yang baru dalam menyerap anggaran secara sempurna.

Temuan peneliti dilapangan menunjukkan bahwa pengetahuan peraturan tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Hal ini dapat dibuktikan dari koefisien regresi yang menunjukkan pengetahuan peraturan berkontribusi sebesar -1,9 % terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa, itu artinya secara keseluruhan responden menjawab tidak setuju bahwa pengetahuan peraturan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa, Berarti pengetahuan peraturan yang dimiliki oleh pegawai dibidang pengadaan pada SKPD Kota Padang tidak digunakan dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa.

Pengaruh Komitmen Manajemen Terhadap Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa

Hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini yaitu komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Hasil uji statistik t untuk variabel komitmen manajemen memiliki nilai t hitung 2.191 dengan nilai signifikansi 0,035 lebih kecil dari 0,05, nilai koefisien regresi komitmen manajemen adalah 0,551. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) diterima.

Teori institusional juga mendukung penelitian ini, institusional sebagai proses dalam organisasi untuk menetapkan suatu karakter yang ditentukan oleh komitmen organisasi dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip (Ridha dan Basuki, 2012). Hal ini dapat dilihat bagaimana SKPD memberikan dukungan secara nyata terhadap kinerja pegawainya berupa waktu yang diperlukan, sumber daya, dan pendekatan positif terhadap proyek yang sedang dikerjakan untuk mencapai penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Komitmen yang tinggi menjadikan individu lebih mementingkan organisasi dari pada kepentingan pribadi dan berusaha menjadikan organisasi menjadi lebih baik. Evaluasi target serapan anggaran, mendukung pelatihan terkait pengadaan, menerapkan sistem honor sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi merupakan bukti adanya komitmen manajemen yang baik dari kepala SKPD terkait penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh arief (2013), lemahnya komitmen manajemen merupakan salah satu faktor penyebab minimnya penyerapan anggaran. Serta hasil penelitian Purtanto (2015), dan Meyulinda (2018) dalam penelitiannya mendapatkan bahwa komitmen manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Penelitian ini juga konsisten dengan penelitian Juliani (2014), yang menyatakan bahwa komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Berarti semakin tinggi komitmen manajemen maka penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa akan maksimal.

Pengaruh Lingkungan Birokrasi Terhadap Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa

Hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini yaitu lingkungan birokrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Hasil uji statistik t untuk variabel lingkungan birokrasi memiliki nilai t hitung 1,146 dengan nilai signifikansi 0,258 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan birokrasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) ditolak.

Menurut perspektif teori institusional, birokrasi merupakan alat atau mekanisme yang dibuat untuk kesuksesan dan efisiensi suatu pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu bagi pemerintah. Birokrasi dapat dipandang sebagai sebuah lambang implementasi yang efisien dari tujuan dan penyediaan layanan. Tidak berpengaruhnya birokrasi terhadap penyerapan anggaran terkait penyediaan barang/jasa dikarenakan Penyediaan barang/jasa pemerintah pada praktiknya sering sekali terkendala alasan birokratis dalam realisasinya. Sehingga, anggaran yang sudah dialokasikan untuk penyediaan barang/jasa pemerintah tidak terserap secara maksimal.

Temuan peneliti dilapangan menunjukkan bahwa lingkungan birokrasi tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Hal ini dapat dibuktikan dari koefisien regresi yang menunjukkan lingkungan birokrasi berkontribusi sebesar 19,7 % terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa, itu artinya hanya sebagian kecil responden menjawab setuju bahwa lingkungan birokrasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa, Berarti lingkungan birokrasi yang terdapat pada SKPD Kota Padang belum mampu menghasilkan tingkat serapan anggaran terbaik terkait penyediaan barang/jasa.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah pengetahuan peraturan, komitmen manajemen, dan lingkungan birokrasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa studi empiris pada seluruh SKPD Kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilaksanakan, maka hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan peraturan tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa di SKPD Kota Padang. Komitmen manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa di Kota Padang. Serta lingkungan birokrasi tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa di SKPD Kota Padang.

Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data pada penelitian ini dijangkau menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan, dan peneliti tidak mampu mengontrol secara ketat seluruh pernyataan responden yang mengisi kuesioner penelitian untuk mengumpulkan data penelitian terhadap tingkat kejujuran responden. Sehingga terkadang jawaban yang diberikan oleh responden tidak menunjukkan keadaan yang sesungguhnya.

2. Walaupun dalam pengisian angket sudah diupayakan secara teliti dan hati-hati, tentunya hal tersebut juga tidak lepas dari kemungkinan adanya responden yang mengisi kuesioner dengan tidak serius dan asal-asalan.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas jangkauan dengan menambahkan wilayah dalam bentuk Provinsi.
2. Penelitian ini hanya memfokuskan pada kepala atau pegawai dibidang pengadaan, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan cara-cara atau metedologi yang lebih baik dalam menentukan responden yang lebih akurat.
3. Penelitian ini masih terbatas pada pengetahuan peraturan, komitmen manajemen, dan lingkungan birokrasi terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan faktor baru diluar faktor pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprlliani, D. A., Herawati, N. T., & Wahyuni, A. M. (2017). Pengaruh Pengetahuan Peraturan dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Penyerapan Anggaran dengan Kepribadian Conscientiousness Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi UNDIKSHA*.
- Arthana, I. M., Ni Putu, S. M., & Made, G. W. (2016). Kejelasan Sasaran Anggaran dan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi Pengaruh Kompetensi Pegawai pada Kinerja Penyerapan Anggaran (Studi pada Satuan Kerja di Lingkup Pembayaran KPPN Denpasar). *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 1143-1170.
- BPKP. (2011). *Menyoal Penyerapan Anggaran*. Yogyakarta: Yogyakarta Review.
- Bramastyasa, G. P. (2019). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia, Lingkungan Birokrasi dan Pengetahuan Peraturan terhadap Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa. *UNISSULA Institutional Repository*.
- Elim, M. A., Ndaparoka, D. S., & Tomasowa, T. E. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Kupang. *Jurnal Akuntansi Politeknik Negeri Padang*.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran hingga Laporan Keuangan, dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Juliani, D., & Sholihin, M. (2014). Pengaruh Faktor-Faktor Kontekstual terhadap Persepsian Anggaran terkait Pengadaan Barang/Jasa . *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 177-199.
- Kuswoyo, I. D. 2011. Analisis atas Faktor-Faktor yang menyebabkan Terkonsentrasinya Penyerapan Anggaran Belanja di Akhir Tahun Anggaran. *Tesis*.
- LKPP. (2011). Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Pengadaan*.
- Mastuti, D. L., Suharno, & Kristiano, D. (2017). Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran, Lingkungan Birokrasi, Komitmen Manajemen, Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*.

- Negara, K. P., Handajani, Lilik & Effendy, L. (2018). Studi Kasus Fenomena Tingkat Serapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah . *Jurnal Akuntansi dan Investasi*.
- Ozal, D. (2012, Agustus 30). *Melalui TEPPA, Presiden Ingin Tahu Penyerapan Anggaran* . Retrieved Februari 14, 2020, from Kompas.com: www.google.com/amp/s/amp.kompas.com
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2011. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Jakarta: Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Jakarta: Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Jakarta: Republik Indonesia.
- Purtanto. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah: Pengadaan Brang/Jasa.
- Putri, C. T., & Fachruzzaman. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja di Pemerintah Provinsi Bengkulu. *Skripsi*.
- Rerung, E. D., Karamoy, H., & Pontoh, W. (2017). Fakto-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah: Proses Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan. *Jurnal Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*.
- Sedarmayanti. (2009). *Membangun dan Mengembangkan Kepemimpinan Serta Meningkatkan Kinerja Untuk Meraih Keberhasilan*. Bandung: PT. Refika Adhitama.
- Setyapurnama, Y. S., & A M, V. N. (2006). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Peringkat Obligasi dan Yield Obligasi. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*.
- Swamandiri. (2011). *Problematika Penyerapan Anggaran di Daerah* . Retrieved Februari 2, 2020, from Swamandiri